

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan “Kebijakan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) Terhadap Gerakan Falun Gong”, menjadi judul skripsi ini. Alasan pertama adalah adanya kenyataan bahwa RRC merupakan negara yang sangat besar penduduknya dan memiliki kebudayaan yang menarik dan tersebar ke penjuru dunia.

Alasan yang kedua, banyak hal-hal yang terjadi di RRC yang merupakan fenomena yang mampu menarik perhatian dunia dan fenomena-fenomena tersebut sering menimbulkan kontroversial maupun polemik di kalangan masyarakat internasional.

Ketiga, RRC merupakan suatu negara komunis yang dalam sistem politiknya terdapat suatu partai besar yaitu Partai Komunis Cina (PKC) yang sangat berkuasa dan memiliki hubungan yang kuat antara mereka yang di puncak dengan yang di akar sistem politik itu.<sup>1</sup> Partai Komunis Cina tersebut sangat berkuasa dan mendominasi sistem pemerintah RRC bahkan sering bertindak otoriter. Gagasan tentang “percaya pada diri sendiri” merupakan unsur lain dalam gaya politik PKC yang selama ini berhasil menciptakan kekuatan besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> diambil dari James R. Townsend, “Politics in China” dalam Gabriel A. Almond (ed.) *Comparative Politics Today* (Boston: Little Brown and Company, 1974), hal.172.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.178.

Selain itu alasan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh lagi tentang kebijakan pemerintah RRC terhadap terhadap gerakan pernafasan Falun Gong atau juga disebut Falun Dafa yang pada tanggal 25 April 1999 melakukan demo bisu dengan cara meditasi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang kasus ini. Selain itu penulis juga berharap agar skripsi ini dapat dijadikan pelajaran dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca semua.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di RRC, khususnya mengenai kebijakan pemerintah RRC terhadap gerakan pernafasan Falun Gong. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori maupun konsep yang pernah penulis peroleh di bangku kuliah. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penelitian ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah salah satu negara di kawasan benua Asia yang berdekatan dengan negara India, Pakistan, Rusia, Korea Utara, Mongolia, Kazakhstan, dan secara regional berdekatan dengan negara-negara Asia

Tenggara dan Jepang (*lihat lampiran 1*). RRC dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1949 oleh Partai Komunis Cina (Kun Chang Tan) yang berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Nasionalis Cina dibawah kekuasaan Kuomintang (KMT).

RRC yang menggunakan sistem totaliter dalam pemerintahannya sangat mengandalkan peran Partai Komunis Cina (PKC). Sistem politik yang berlaku di RRC adalah sistem otoritarianisme atau monopoli kekuasaan oleh satu partai yaitu PKC, yang tidak mengakui kekuasaan politik lain kecuali Partai Komunis Cina. PKC sangat berkuasa di RRC, dan semua keputusan pemerintah mutlak berada di tangan PKC. PKC merupakan partai terbesar di RRC dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan segala hal yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan, politik dan ekonomi RRC.

RRC memiliki penduduk yang sangat besar dan juga memiliki kebudayaan yang beraneka ragam yang antara lainnya adalah gerakan pernafasan semacam Yoga, kemudian seni beladiri semacam Tai Chi dan banyak juga aliran kepercayaan dari negeri ini yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya adalah gerakan pernafasan Falun Gong.

Falun Gong diperkenalkan di Timur Laut Cina pada tahun 1992 oleh Li Hongzhi (*lihat lampiran 2*).<sup>3</sup> Di tahun 1980-an, Li mulai berlatih Qiqong<sup>4</sup>, sistem latihan pernafasan yang telah berusia berabad-abad - kadang kala disebut sebagai

---

<sup>3</sup> Li Hongzhi merupakan seorang mantan birokrat yang menangani masalah pertanian dan distribusi bahan makanan di sebuah desa Propinsi Jilin,.

<sup>4</sup> Qiqong adalah suatu tradisi Cina kuno yang menggabungkan meditasi dan gerak untuk memanfaatkan energi yang disebut Qi (energi kehidupan alam).

“Yoga dari Cina” - yang diajarkan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan kesadaran spiritual. Qiqong dan berbagai variasinya ditindas diseluruh negeri di tahun 1949, setelah PKC mengambil-alih kekuasaan di Beijing. Tetapi keadaan penindasan berbagai aliran qiqong (termasuk Falun Gong) oleh negara tangan besi tersebut sedikit melunak pada era tahun 1980an.

Pada saat itu Falun Gong baru saja diperkenalkan oleh Li, mengandung unsur Konfusianisme, Budhisme dan Taoisme. Pada pokoknya, Falun Gong mengajarkan metode meditasi melalui latihan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran fisik maupun spiritual. Li mendaftarkan gerakan ini kepada Asosiasi Riset Qiqong milik pemerintah dan pada pertengahan tahun 1990an menyatakan telah memiliki sekitar 60 juta praktisi. Persatuan Olahraga milik pemerintah RRC sendiri memperkirakan ada sekitar 70 juta pengikut aktif di tahun 1999.

Falun Gong merupakan bagian dari ledakan aktifitas religius yang muncul di RRC pada tahun 1980an sebagai “bagian dari Cina pada saat ‘kekosongan spiritual pasca Mao’ dan merupakan kemunduran dari ideologi partai akan pengawasan terhadap masyarakat...”<sup>5</sup> Daya tarik utama Falun Gong sebagian dikarenakan komitmen yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan budaya tradisional Cina. Pengikut Falun Gong secara berkala berkumpul di banyak sekali kota di Cina untuk melakukan latihan. Di Beijing sendiri ada lebih dari 2000 tempat latihan.

---

<sup>5</sup> David Ownboy, “Falun Gong and Canada’s China Policy”, *International Journal*, vol.56, Spring 2001, hal.30.

Falun Gong tidak hanya berkembang di negara RRC saja, tetapi juga telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Falun Gong telah menyebar ke paling sedikit di 78 negara dan wilayah, termasuk regional Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, sebagian besar wilayah di Eropa dan beberapa negara di Afrika. Pendiri Falun Gong, Master Li Hongzhi, mengklaim bahwa praktisi Falun Gong telah mencapai 100 juta orang lebih, yang tersebar di berbagai negara di seluruh belahan dunia. Selain memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada praktisi-praktisi Falun Gong di RRC, praktisi Falun Gong di berbagai negara lain ini juga berkembang secara organisasi.

Konfrontasi pribadi Jiang Zemin (presiden RRC pada saat itu) dengan Falun Gong telah mulai berkembang pada tahun 1996, dimulai ketika buku Li Hongzhi, *Zhuan Falun*, terjual hampir sejuta kopi di seluruh Cina. Pada tanggal 25 April 1999, pengikut Falun Gong melakukan aksi demonstrasi bisu dengan cara meditasi di trotoar sepanjang jalan menuju Zhongnanhai, tempat pemimpin-pemimpin RRC bekerja, sekaligus kompleks kediaman pejabat tinggi Beijing, dan mereka juga mengepung kantor pusat PKC. Aksi diam tersebut dilakukan untuk memprotes pemberitaan yang tidak fair dalam suatu media pemerintah. Aksi demonstrasi bisu ini juga dilakukan di 40 kota lainnya di RRC. Melihat hal ini, pada akhirnya pada tanggal 22 Juli 1999, pemerintah RRC mengeluarkan suatu kebijakan terhadap gerakan pernafasan dan praktisi Falun Gong.

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan pemerintah RRC terhadap gerakan pernafasan dan praktisi Falun Gong ?.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah teori, konsep dan model yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi. Jadi selain dipakai eksplanasi, teori juga menjadi suatu penyelesaian yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logika saling berhubungan.<sup>6</sup>

Dengan pendapat lain, bahwa teori adalah suatu cara untuk mengorganisir pengetahuan kita sehingga kita bisa mempergunakan pertanyaan yang lantas dicarikan jawabannya dan membimbing penelitian atau riset kita kearah jawaban yang valid.<sup>7</sup> Untuk menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah RRC terhadap gerakan pernafasan dan praktisi Falun Gong, penulis mencoba menggunakan teori Sistem Politik, konsep Totaliterisme dan teori Diplomasi untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>6</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.46.

<sup>7</sup> James E. Daugherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr., *Contending Theories of International Relations* (New York: Harper & Row Publishers, 1981), hal.59.

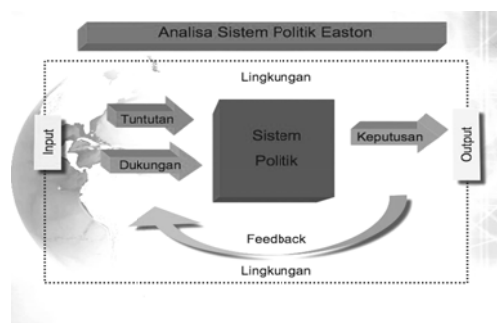
## **Teori Sistem Politik**

David Easton menawarkan suatu batasan bagi sistem politik yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) *the political system allocates values (by means of politics)*; (2) *its allocations are authoritative*; and (3) *its authoritative allocations are binding on the society as a whole*.<sup>8</sup>

Pengertian atau batasan yang dikemukakan oleh David Easton di atas menyatakan bahwa sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dimana pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Gambar diagram di bawah ini akan lebih membantu menjelaskan teori yang akan digunakan yaitu sistem politik.

### **Analisa Sistem Politik Easton**



Sumber: Mohtar Mas' oed dan Colin Mc.Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.

<sup>8</sup> Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal.2.

Jika kita beranggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada.<sup>9</sup>

Berdasarkan gambar diatas input-input yang berupa tuntutan atau permintaan dan dukungan inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang baru diperoleh oleh sistem itu, dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu.<sup>10</sup> Tuntutan dan dukungan yang merupakan input dapat berasal dari dalam lingkungannya maupun dari luar. Setelah input diterima maka akan diproses dalam sistem politik, misalnya dalam parlemen diadakan rapat untuk mengolah input-input tersebut. Sistem politik ini disebut juga “*black box*” karena dalam proses pengolahannya bersifat rahasia dan orang luar (masyarakat) tidak tahu apa yang terjadi di dalam “kotak hitam” tersebut.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang yang telah terlibat atau melibatkan diri di dalam aktivitas politik, yakni aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat maka dapat dinyatakan mereka sudah terlibat dalam sistem politik.

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hal.4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.8.



Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam, hal yang terjadi disekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungannya masuk ke dalam sistem politik. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Dari lingkungan inilah mengalir tuntutan dan dukungan yang kemudian masuk kedalam sistem politik. Setelah melalui proses dan kemudian menghasilkan keputusan/kebijakan atau disebut juga dengan output. Output ini mengalir ke masyarakat atau mungkin akan kembali lagi masuk mempengaruhi sistem politik sebagai input.

Teori sistem politik dapat bekerja jika ada input yaitu tuntutan dan dukungan dari lingkungannya. Dalam hal pengambilan kebijakan terhadap Falun Gong, pemerintah RRC menerima input berupa tuntutan yang berasal dari dalam (internal), yaitu dari dalam pemerintahan RRC sendiri dan dari para elite partai. Pemerintah RRC beranggapan bahwa gerakan Falun Gong merupakan aliran sesat yang telah membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, juga bagi diri anggota Falun Gong sendiri dan keluarganya. Bertambah populernya gerakan tersebut juga membangkitkan kepanikan para pemimpin partai, termasuk Jiang Zemin yang merupakan pemimpin PKC. Selain itu dengan adanya berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh praktisi Falun Gong di berbagai kota besar di RRC, secara langsung telah mengancam stabilitas keamanan dan politik di RRC. Dukungan internal didapat dari lapisan masyarakat, mayoritas rakyat pedesaan, dan dari dalam pemerintahan sendiri.

Dari input yang ada maka akan diteruskan kedalam pengolahan sistem politik dimana didalamnya akan terjadi “penggodokan” yaitu pengolahan input yang masuk. Pemerintah RRC melakukan pengolahan yang kemudian hasilnya disahkan oleh Kongres Rakyat. Setelah input diolah maka dihasilkannya output atau keputusan. Output inilah yang diambil oleh pemerintah RRC yang berupa kebijakan represif terhadap gerakan pernafasan Falun Gong. Pada tanggal 22 Juli 1999, Kementerian Urusan Sipil RRC mengeluarkan Keputusan Mengenai Pelarangan terhadap “Falun Dafa Research Society”. Pemerintah RRC mengikuti keinginan rakyatnya, dan berdasarkan hukum yang berlaku melarang Falun Gong. Pemerintah RRC melalui Kementerian Keamanan Umum mengumumkan “Enam Larangan,” termasuk “melarang siapa saja, di mana saja untuk menggantung atau memasang spanduk Falun Gong, lambang, gambar dan tanda-tanda lainnya dari Falun Gong; melarang siapa saja untuk membagikan atau mempromosikan buku-buku Falun Gong, video atau materi audio dan jenis materi yang lainnya; melarang masyarakat berkumpul untuk berlatih Falun Gong, mempromosikan Falun Gong, atau ikut serta dalam segala jenis bentuk aktivitas Falun Gong lainnya pada setiap saat; melarang menggunakan meditasi, menuntut keadilan, dan metode lainnya untuk melindungi atau mempromosikan Falun Gong dalam suatu kumpulan, gerakan, atau demonstrasi; melarang siapa saja untuk membuat atau mengubah fakta, secara sengaja menyebarkan desas-desus, atau menggunakan metode lain untuk mengacau dan merusak kehidupan sosial;

melarang siapa saja untuk mengatur, berhubungan dengan, atau memimpin aktivitas yang menentang keputusan pemerintah.”<sup>11</sup>

### **Konsep Totaliterisme**

Totaliterisme adalah suatu paham dimana semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan pendidikan diawasi dan didominasi oleh negara. Dengan demikian cara-cara totaliter tidak mengakui hak-hak individu bisa dipindahkan.<sup>12</sup> Totaliterisme menolak konsep Kristen, Yahudi, Islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Marx menentang kepercayaan agama sebagai tidak ilmiah karena kepercayaan itu tidak bisa dibuktikan dalam suatu laboratorium bahwa ada Tuhan.<sup>13</sup> Negara totaliter bukan hanya sekedar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat, dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan elit politik kecil yang despotik, ia bukan juga seorang rezim yang diktator yang haus kekuasaan, melainkan negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang dengan melebihi bentuk kenegaraan despotik tradisional, secara menyeluruh mengontrol, menguasai dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Penguasa totaliter tidak hanya memimpin tanpa gangguan dari bawah, ia tidak hanya mau memiliki kekuasaan, melainkan ia mau secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati, ia juga mau mengontrol apa yg mereka pikirkan.

---

<sup>11</sup> [http://www.falundafa.or.id/ib\\_perjalananfalundafa.htm](http://www.falundafa.or.id/ib_perjalananfalundafa.htm).

<sup>12</sup> John N. Hazard, *The Soviet System of Governement* (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), hal.126.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hannah Arendt, *Asal-Usul Totaliterisme*, Jilid III (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1995), hal.11.

Menurut Hannah Arendt dalam bukunya “*Asal-Usul Totaliterisme*” menegaskan bahwa ciri-ciri hakekat pemerintahan totaliter adalah, totaliterisme bukan sekedar peningkatan bentuk pemerintahan operesif seperti despotisme, pemerintahan tirani dan diktator, melainkan sesuatu yang hakiki baru. Totaliterisme selalu mengembangkan lembaga-lembaga politik baru dan menghancurkan semua tradisi sosial, legal dan politik yang ada di negara itu. Totaliterisme mengubah kelas-kelas sosial menjadi massa, menggantikan sistem multi partai bukan dengan partai tunggal, melainkan dengan suatu gerakan massa, mengalihkan pusat kekuasaan baru tentara ke polisi rahasia, mengalihkan politik luar negeri secara terbuka kepada kekuasaan dunia. Di negara totaliter, rezim yang berkuasa sudah tentu menganut cara-cara yang otoriter, akan tetapi penguasa yang otoriter belum tentu totaliter.

Totaliterisme adalah dominasi total, berbeda dengan otoriterisme yang masih membolehkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat berfungsi bebas sepanjang tidak terlibat dalam kegiatan politik. Totaliterisme bertujuan mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ke dalam suatu pola politik tertentu. Struktur politik ini tidak saja mengharamkan semua oposisi, tetapi juga mencegah otonom lembaga sampai ke struktur politik.<sup>15</sup>

Upaya totaliterisme kearah penaklukan global dan dominasi total merupakan jalan keluar destruktif dari semua kendala. Kemenangannya sekaligus merupakan kehancuran kemanusiaan, di manapun totaliterisme berjaya, ia mulai meremukan hakekat manusia. Totaliterisme dengan tingkat kebrutalannya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.105.

membuktikan bahwa martabat manusia memerlukan jaminan baru yang hanya dapat diperoleh dalam prinsip politik baru. Satu hukum baru di atas bumi yang kesahihannya harus mencakup seluruh masalah kemanusiaan sementara kekuasaannya tetap dibatasi secara ketat, berakar dan dikendalikan oleh entitas-entitas teritorial.

Ciri khusus lain dari totaliterime adalah seperti penunjukan pejabat dari atas dan memonopoli penunjukan-penunjukan di tangan satu orang. Bila pejabat yang ditunjuk dari atas memiliki wewenang dan tanggungjawab, maka kita berhubungan dengan struktur hirarki, dimana kekuasaan dan wewenang didelegasikan dan diatur oleh hukum kekuasaan mutlak dari atas ke bawah dan kepatuhan mutlak dari bawah ke atas; suatu rantai komando yang ditata secara hirarkis, kekuatan komando tergantung pada seluruh sistem hirarkis dimana ia beroperasi.<sup>16</sup>

Pola sistem totaliterisme sama dengan penerepan sistem politik di RRC. RRC yang merupakan negara totaliter yang dalam sistem pemerintahannya terdapat piramid yang mana masing-masing dari piramid tersebut bersifat komando, meski banyak organ-organ pemerintah, akan tetapi karena negara ini bersifat totaliter, keputusan dan kewenangan hanya terdapat di tangan penguasa, komando tersentralisir dari atas.

RRC merupakan negara totaliter dimana dalam pemerintahannya menggunakan ideologi komunis, dengan begitu menggunakan sistem

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.97-98.

pemerintahan komunis yang hanya mengenal satu Partai Komunis. Sebenarnya partai ini tidak bisa dikatakan partai politik<sup>17</sup>, karena alasan pokok masih adanya partai-partai politik yang merupakan perwakilan bagi kelompok-kelompok warga negara yang berbeda pandangan politiknya.

Sistem komunis tidak mengenal kelompok-kelompok, yang ada hanya ada satu kelompok saja yang menguasai pemerintah. Suatu usaha untuk membentuk partai lain adalah suatu kejahatan dan dihukum karena dianggap sebagai pengkhianatan.<sup>18</sup> Sehingga dalam sistem politik, posisi pusat dipegang Partai Komunis, hal ini berdasarkan dua alasan yang keduanya berasal dari Lenin. Pertama, Partai Komunis di definisikan sebagai barisan depan kaum proletar dan dalam setiap negara yang diperintah oleh Proletariat, Partai Komunis harus memerintah. Kedua, Partai Komunis dengan sukses mengambil kekuatan revolusi komunis yang pertama dan membangun semua mesin pemerintah, jadi Partai Komunis membentuk pemerintahan yang diharapkan dapat menjalankannya.<sup>19</sup>

Pembenaran terhadap pandangan adanya satu partai saja, bahwa sistem dua partai atau lebih merupakan buah pikiran kapitalisme, yang mengandung petentangan kepentingan antara kaum kapitalis dan kaum proletariat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa partai komunis merupakan satu-satunya organisasi yang sah di negara komunis. Partai Komunis adalah pemelihara dan penerjemah ideologi resmi yang memerintah negara.

---

<sup>17</sup> Herqutanto Sosronegoro, *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal 84-85.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.86.

<sup>19</sup> Liman Tower Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hal.140-141.

Tujuan utama "partai politik" ini antara lain juga memberikan sarana pengawasan terhadap birokrasi negara terhadap warga negara yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Begitu juga halnya dengan Partai Komunis di RRC, yang dipimpin oleh Jiang Zemin. Partai komunis Cina (PKC) yang merupakan partai terbesar dan memiliki kekuasaan di RRC berhak untuk melakukan apa saja termasuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap membahayakan kedudukan mereka. Mereka dapat melakukan dan memutuskan apa saja untuk mencapai tujuannya

Menurut Partai Komunis Cina, Falun Gong merupakan organisasi ilegal yang mencoba menggantikan lembaga pemerintahan dengan menggambarkan diri pemimpinnya (Li Hongzhi), seolah-olah seperti dewa.<sup>20</sup> Para pengikut Falun sangat mempercayai dan memuja Li. Pengikut Falun mau melakukan apa saja yang dikatakan Li Hongzhi. Inilah yang menyebabkan Pemerintah Komunis Cina takut terjadi tindakan subversi dari anggota Falun Gong yang jumlahnya sudah melampaui jumlah anggota Partai Komunis Cina. Hal ini sangat membahayakan pemerintah RRC. Pemerintah RRC menuding gerakan Falun Gong sama dengan berbagai gerakan makar berbau mistik. Sehingga pemerintah RRC harus segera menindak gerakan Falun Gong sebelum gerakan tersebut menggeser kedudukan Partai Komunis dan menghancurkan pemerintah Komunis Cina yang dikuasai PKC.

PKC juga melihat ancaman dari Falun Gong tidak hanya berasal dari internal dalam negeri RRC saja, tetapi juga berasal dari luar RRC yaitu

---

<sup>20</sup> "Cina: Tangkap Pemimpin Falun Gong", *Kompas*, 30 Juli 1999, hal.1

perkembangan pesat Falun Gong yang telah menyebar ke seluruh belahan dunia. Dalam pengamatan PKC, cabang Falun Gong di berbagai negara ini tentunya mendukung seluruh aktivitas gerakan dan praktisi Falun Gong di RRC. Dukungan tersebut dilakukan dengan melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintahan RRC di berbagai Kedutaan Besar RRC dan kantor perwakilan RRC di berbagai negara, dan berusaha untuk menarik simpati dan dukungan dari pemimpin negara lain untuk turut menentang diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu hambatan terhadap kebijakan internal pemerintah RRC terhadap Falun Gong. Menurut para elite partai PKC, yang merupakan motor penggerak pemerintahan RRC, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pelarangan terhadap gerakan Falun Gong di RRC, maka seluruh aktivitas gerakan Falun Gong di berbagai negara lain juga harus dihentikan.

### **Teori Diplomasi**

Definisi diplomasi dalam Oxford English Dictionary menyebutkan:

*“The management of international relations by negotiation.” “The method by which these relations are adjusted and managed”<sup>21</sup>*

Sir Ernest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa diplomasi adalah *“The application of intelligence tact to conduct of official*

---

<sup>21</sup> Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1967), hal.163.



*relations between the governments of independent states.*”<sup>22</sup> (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat).

Pengertian diplomasi hampir sama dengan politik luar negeri. Politik luar negeri menetapkan tujuan dan sasaran, sementara diplomasi mencakup sarana dan mekanisme untuk mencapai sasaran dan tujuan dari politik luar negeri di luar batas wilayah yurisdiksi. Diplomasi merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam banyak hal diplomasi yang erat kaitannya dengan hubungan antar negara memberikan suatu peranan yang besar dalam pemeliharaan perdamaian dengan mengedepankan segi negosiasi, pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional sangat mengikat dalam hubungan internasional, seperti yang dinyatakan Morgenthau “suatu pra-kondisi bagi penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsensus internasional baru yang memungkinkan diplomasi mendukung *“peace through accomodation”* (damai melalui penyesuaian).<sup>23</sup> Kissinger juga menunjukkan bahwa diplomasi berperan penting dalam penyesuaian perbedaan-perbedaan antar bangsa-bangsa. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (pembagian yang adil).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.164.

<sup>23</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, diterjemahkan oleh Harwanto Dahlan (Jakarta: Mirsawati, 1995), hal.23.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.6.

Tugas diplomasi yang meliputi keseluruhan jajaran politik luar negeri adalah, (1) diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya, (2) diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain, (3) diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuannya, (4) diplomasi harus menggunakan saran-sarana yang cocok untuk mencapai tujuannya.<sup>25</sup> Dalam pelaksanaan diplomasi sarana yang sangat menentukan diantaranya adalah bujukan (*persuasion*), kerjasama (*compromise*), dan ancaman kekerasan (*threat of force*). Ancaman kekerasan atau perang adalah tindakan terakhir dari diplomasi bila diplomasi gagal meraihnya dengan damai.

Dalam hubungannya dengan kebijakan luar negeri terhadap Falun Gong, pemerintah RRC yang dilakukan oleh pemerintah RRC, melalui diplomat, duta besar dan para staf Kementerian Luar Negeri RRC melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara lain. Diplomasi ini sendiri ditujukan sebagai upaya untuk menghentikan seluruh aktivitas gerakan dan praktisi Falun Gong diberbagai dunia, yang pada akhirnya dimaksudkan untuk mematikan gerakan Falun Gong secara keseluruhan, baik di RRC maupun di dunia.

Pemerintah RRC menganggap bahwa gerakan Falun Gong merupakan gerakan makar karena telah mengganggu stabilitas keamanan dan politik di RRC, dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan subversi terhadap pemerintah. Tentunya hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemimpin negara lain terjadi di negaranya. Salah satu kebijakan yang didiplomasikan dengan utusan atau wakil

---

<sup>25</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace* (5<sup>th</sup> edition; New York: Alfred Knopf, 1973), hal.296.

negara lain adalah larangan bepergian baik keluar maupun kedalam negeri bagi praktisi Falun Gong di negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran praktisi-praktisi Falun Gong tersebut akan melakukan aksi demonstrasi di berbagai Kedutaan Besar RRC di negara-negara tersebut untuk mendukung Falun Gong ataupun menentang kebijakan pemerintah RRC terhadap Falun Gong.

Dalam upaya menghentikan perkembangan gerakan Falun Gong, pemerintah RRC melakukan upaya diplomasi secara langsung kepada wakil-wakil atau utusan suatu negara di RRC, melalui Kedutaan Besar RRC, maupun melalui kunjungan kenegaraan di berbagai negara. Kedutaan besar RRC di seluruh dunia juga secara besar-besaran turut membantu menyebarkan berbagai buku bergambar, booklet, brosur, VCD, majalah dan dokumen untuk mengungkap Falun Gong. Situs Kementerian Luar Negeri RRC menyediakan kolom khusus mengenai Falun Gong. Sarana kerjasama sangat berperan penting dalam diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah RRC, tentunya hal ini didukung pula dengan kekuatan ekonomi, politik dan militer yang dimiliki oleh pemerintah RRC.

## **F. Hipotesa**

Kebijakan pemerintah RRC terhadap gerakan dan praktisi Falun Gong, yaitu:

a. Kebijakan Internal

Pemerintah RRC melarang gerakan Falun Gong di RRC, melalui Keputusan Mengenai Pelarangan terhadap “Falun Dafa Research Society” dan kebijakan “Enam Larangan” terhadap gerakan Falun Gong.

b. Kebijakan Eksternal

Pemerintah melakukan upaya diplomasi terhadap negara-negara lain, yang ditujukan untuk menghentikan seluruh aktivitas gerakan dan praktisi Falun Gong di berbagai negara di dunia.

**G. Jangkauan Penelitian**

Ditetapkan mulai tahun 1999-2006 dengan tetap tidak mengabaikan kejadian-kejadian di waktu lain yang relevan sebagai jangkauan penelitian.

**H. Teknik Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, serta informasi-informasi yang penulis peroleh melalui internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori ataupun konsep-konsep yang ditetapkan.

## **I. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang runut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan konseptualisasi dan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis guna menemukan jawaban atas fenomena yang hendak penulis analisis. Dalam bab pertama ini berisi pendahuluan yang antara lain berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini memuat tentang totaliterisme RRC dimana didalamnya membahas tentang totaliterisme, ideologi komunis RRC dan prinsip-prinsip komunisme.

Bab Ketiga, bab ini berisi tentang gerakan Falun Gong yang didalamnya akan dijabarkan sejarah, pengertian, perkembangan Falun Gong di dunia, dan selain itu juga akan diceritakan tentang Falun Gong sebagai gerakan massa di RRC.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang kebijakan pemerintah RRC terhadap gerakan Falun Gong yang mana didalamnya berisi kebijakan-kebijakan pemerintah RRC, yang terdiri dari kebijakan internal dan eksternal pemerintah RRC terhadap Falun Gong.

Bab Kelima, bab ini menyimpulkan isi dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran penulis.